KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabil'alamiin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi dengan judul **"Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020"**. Sholawat beserta salam tidak lupa penulis ucapkan kepada Nabi junjungan umat yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benarang seperti sekarang ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah ikut memberikanbantuan baik berua sarana, pemikiran, motovasi, materi dan doa.

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum** selaku Rektor IAIN Bukittinggi beserta jajaran yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama melanjutkan pendidikan di IAIN Bukittinggi.
2. Bapak **Dr. Iiz Izmuddin, MA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi.
3. Ibu **Nini Sumarni, SE. M.,Si** selaku Ketua Jurusan S1 di Akuntansi Syariah IAIN Bukttinggi.
4. Ibuk **Tartila Devy, SE. M., Ak** selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan selama perkuliahan.

5. Bapak **Ilham Illahi, SE. M., Sc** selaku dosen pembinmbing yang telah meluangakan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dan ilmu pengentahuan serta kesabaran dalam menyekesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibuk Dosen Fakultas Ekonomi dan Binsnis Islam IAIN Bukittinggi yang telah memberikan dan membekali ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak/Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati IAIN Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
8. Bapak/Ibu pegawai Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi yang telah memberikan kesempatan melakukan penelitian dan juga telah membimbing dalam melakukan penelitian.
9. Para sahabat- sahabat kelas AK A angkatan 2018 yang selalu memberikan semangat, motivasi dan menemani penulis bersama-sama menimba ilmu selama perkuliahan.

Terimakasih kepada kedua orangtua tercinta saya Apa **Satriyon** dan Ama **Junimar**, tempat saya mengadu segala rasa, yang telah memberikan motivasi yang dibarengi dengan kasih sayang, materi dan doa yang tiada hentinya, yang membuat penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya terimakasih kepada saudara saudara saya **Rama Joni**, **Fitriani**, **Novri Ari**, **Muhammad Idris** yang telah memberikan saya doa dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan mengajukan pertanyaan kapan wisudanya dan juga pengalaman hidup perjuangan membantu orang tua ke ladang dan di rumah selama masa- masa sekolah maupun waktu libur, walaupun sekarang kebanyakan adik kalian hanya

jadi generasi rabahan semenjak corona ini untuk menghindari dunia pergosipan kampung yang meraja lela disetiap sudut.

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya dalam penulisan skrisi ini jauh dari kata sempurna, umtuk itu penulis menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah lah kita berserah diri, yang Maha luas ilmu-Nya dan Maha Bijaksana.

Bukittinggi, Juni 2022

Penulis

Rini Wahyuni

NIM. 341021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL..... vi

DAFTAR BAGAN.....vii

DAFTAR TABEL..... vii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah 9
C. Batasan Masalah.....9
D. Rumusan Masalah 9
E. Tujuan Penelitian.....10
F. Manfaat Penelitian.....10
G. Ruang Lingkup Penelitian.....11
H. Penjelasan Judul 11
BAB II.....13
TINJAUAN PUSTAKA 13
A. Akuntansi Sektor Publik.....13
B. Grand Theory 14
C. Keuangan Daerah 15
D. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 18
E. Laporan Keuangan Daerah.....22
F. Laporan Realisasi Anggaran 25
G. Belanja Daerah 28
H. Analisis Keuangan Daerah 31

I. Landasan Syariah 37
J. Kajian Terdahulu 39
BAB III 47
METODE PENELITIAN 47
A. Jenis Penelitian 47
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 47
C. Jenis Dan Sumber Data 48
D. Populasi Dan Sampel 48
E. Teknik Pengumpulan Data 49
F. Teknik Analisa Data 50
BAB IV 53
PEMBAHASAN 53
A. Profil Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi 53
1. Sejarah Instansi 53
2. Lokasi Instansi 54
3. Visi Misi 54
4. Tujuan 55
5. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi 56
6. Kebijakan 57
7. Struktur Organisasi Kerja Industri Mitra 57
B. Perhitungan Rasio Kinerja Reaisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Bukittinggi 59
1. Perhitungan Analisis Varians Belanja 59
2. Perhitungan Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah 63
3. Perhitungan Analisis Rasio Efisiensi 67
4. Perhitungan Analisis Keserasian Belanja 70
C. Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi 75
1. Pertumbuhan realisasi anggaran belanja dari periode 2016 sampai dengan 2020 75
2. Efisiensi penggunaan anggaran belanja selama tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2020 76

3. Optimalisasi dalam memprioritaskan belanja pemerintah daerah pada peggunaan anggaran.....77
BAB V.....79
PENUTUP.....79
A. Kesimpulan.....79
B. Saran.....80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi 2016- 2020..... 5

Tabel 1.2 Penjelasan Judul 12

Tabel 2.1 Kajian Terdahulu 40

Tabel 4.1 Analisis Varians Belanja Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016- 2020..... 92

Tabel 4.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Daerah 2016- 2020 96

Tabel 4.3 Analisis Pertumbuhan Belanja Tahun 2016- 2020 97

Tabel 4.4 Rasio Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2016- 2020..... 99

Tabel 4.5 Perhitungan Rasio Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun 2016- 2020 101

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Pemerintah

Kota Bukittinggi 54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu negara yang telah merdeka, bersatu dan berdaulat yang nama dalam pengelolaan Negaranya Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang demokratis. Pemerintah adalah suatu kelompok atau organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.[1]Pemerintah juga bisa diartikan dengan orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah untuk dan atas nama Menteri dalam negeri atau kepala daerah. Pada zaman moderen sekarang fungsi utama pemerintah adalah melayani kebutuhan masyarakat dan sebagai penyelenggara administrasi negara. Peranan atau tugas yang diselenggarakan oleh pemerintah harus sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang- Undang Dasar memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip- prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman derah. Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu di tingkatkan dengan

[1] Nur Aisyah, *Hukum Administrasi Negara,* Ad. 1. Cet. 1, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), Hal. 44

memperhatikan aspek- aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan atau pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban penyelenggaraan otonomi daerah.[2]

Pemerintah daerah yang telah diberikan wewenang dan kebebasan di dalam mengelola daerahnya sendiri atau yang dikenal dengan otonomi daerah terdapat pada Undang- undang No. 32 Tahun 2004,[3] dan Undang- undang No. 23 Tahun 2014 mengenai pemerintah daerah, bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[4] Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Mardianso (2009) mengatakan bahwa untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan otonomi diperlukan sebuah evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya.[5]

Dalam menyelenggarakan tugasnya, pemerintah daerah dibantu oleh instansi pemerintah daerah. Instansi adalah suatu badan yang dibentuk oleh

[2] Widjaja Haw, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), Hal. 37
[3] Undang- undang No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan disentralisasi fiskal
[4] Undang- undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah
[5] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2009),

pemerintah. Instansi dalam pemerintahan salah satunya adalah instansi pemerintah daerah.[6] Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi serta otonomi fiskal maka daerah diberikan wewenang untuk mengelola seluruh jenis penerimaan dan pengeluaran suatu daerahnya.

Dalam mengelola keuangan pemerintah memerlukan anggaran sebagai pedoman yang akan digunakan untuk masa yang akan datang. Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan.[7] Di dalam anggaran terdapat harapan manajemen terhadap pendapatan, biaya dan transaksi lainnya selama periode tertentu. Informasi tentang anggaran dimuat dalam laporan realisasi anggaran yang menyajikan informasi pendapatan dan belanja beserta dengan realisasinya.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dinilai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksakan kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Penganggaran dilakukan guna

[6] Undang- undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016, Edisi Pertama. Cet. Ke-1. (Yogyakarta: Manuscript), Hal. 77
[7] M.Nafarin, *Penganggaran perusahaan*. Edisi 3, (Jakarta: Salemba Empat, 2018), Hal. 11

untuk mempermudah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan dengan lancar.

Anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (Rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). Anggaran daerah atau anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran hendaknya difokuskan kepada upaya untuk mendukung pelaksanaan aktivitas atau program yang menjadi prioritas dan preferensi daerah.[8] Anggaran dalam pemerintah merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja.[9]

Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Kota Bukittinggi telah diberikan wewenang untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri, salah satu wewenang tersebut adalah mengelola belanja daerah yang mana dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah yaitu Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi. Belanja daerah adalah instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah.[10]

[8] Nurkholis. Moh.Khusaini, *Penganggaran Sektor Publik, (*Malang: UB Press, 2019), Hal. 4
[9] Grace Y. Liando. Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Analisis Kinerja Belanja.*Vol. 4 No. 1 Maret 2016. Hal. 1474.
[10] Asyiah Nur, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018),

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.[11] Analisis belanja daerah dimuat dalam Laporan Realisasi Anggaran Daerah dimana informasi yang disajikan di dalamnya memberikan manfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Laporan Realisasi Anggaran Menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang di anggap paling utama.

Berikut data Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 yaitu:

Tabel 1.1
Data Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Bukittinggi
Tahun 2016- 2020

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Realisasi Terhadap Anggaran
2016	739.912.598.927,22	630.661.294.710,00	85,23%
2017	732.873.501.966,34	590.090.904.897,65	80,51%
2018	838.430.535.411,22	703.783.258.315,95	83,94%
2019	890.512.534.055,88	716.528.264.978,33	80,46%
2020	882.923.068.255,10	795.954.479.299,95	90,14%

Sumber data: Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi

[11] Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019. Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018.

Dari tabel yang disajikan di atas bisa dilihat bahwa pada tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi penurunan terhadap realisasi belanja daerah dengan anggaran belanja daerah sebesar 4,72%. Bagusnya, pada tahun 2018 realisasi belanja daerah dan anggaran belanja daerah mengalami peningkatan sebesar 3,43%. Pada tahun 2019 realisasi belanja daerah dan anggaran belanja daerah kembali mengalami penurunan sebesar 3,48%. Pada tahun 2020 realisasi belanja daerah dan anggaran belanja daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 9,68%.

Dengan adanya perbedaan anggaran belanja daerah dan realisasi belanja daerah pada Kota Bukittinggi maka dilakukan suatu analisis guna menilai kinerja realisasi belanja daerah pada Kota Bukittinggi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Dalam melakukan analisis kinerja realisasi belanja daerah pada Kota Bukittinggi dilakukan analisis- analisis yang berkaitan dengan belanja daerah. Analisis yang di gunakan adalah analisis varian belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis rasio efesiensi belanja, analisis rasio belanja operasi, analisis rasio belanja modal.[12]

Analisis varian belanja adalah yang merupakan analisis terhadap selisih antara realisasi belanja dengan anggaran belanja yang berfungsi untuk mengetahui efisiensi penggunaan anggaran belanja yang digunakan selama tahun anggaran tersebut. Terdapat ketentuan bahwa anggaran merupakan batas

[12] Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Panduan Bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politi*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2007), Hal. 142

maksimum yang boleh dikeluarkan oleh pemerintah daerah.[13] Dalam hal ini pemerintah daerah dinilai baik belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi yang dianggarkan.

Analisis pertumbuhan belanja merupakan rasio yang ini berfungsi untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ketahun serta mengevaluasi potensi- potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Pada dasarnya belanja selalu memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing- masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah.[14]

Analisis rasio efisiensi belanja merupakan dimana pemerintah daerah di anggap telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensi bernilai kurang dari 100%, begitu pun sebaliknya jika nilai efisiensinya bernilai lebih dari 100% maka pemerintah daerah teridentifikasi melakukan pemborosan pada anggaran belanja daerah. Rasio efisiensi belanja daerah ini dapat kita

[13] Ardon F. Honga, Ventje Ilat. *Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung.* Jurnal Analisis Realisasi Anggaran. Vol. 2 No. 4. Desember 2014. Hal. 281

[14] Mahmudi, *Ibid,* Hal.145

perolehi nilainya dengan cara nilai realisasi belanja daerah dibagikan dengan nilai anggaran belanja daerah kemudian dikalikan dengan seratus persen.[15]

Analisis rasio belanja operasi yang mana merupakan analisis belanja operasi terhadap total belanja yang membandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi ini adalah belanja yang bersifat habis di gunakan dalam satu tahun anggaran, yang mana belanja operasi ini bersifat jangka pendek dan dalam waktu tertentu ia bersifat rutin atau berulang.[16]

Analisis yang terakhir adalah rasio belanja modal yang mana analisis belanja modal ini dapat diperoleh dengan cara belanja modal dibagi dengan total belanja daerah kemudian dikalikan dengan seratus persen. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Rasio ini berguna untuk menunjukkan bahwa jika belanja modal pemerintah yang semakin meningkat membuktikan bahwa pemerintah daerah mampu memenuhi modal berupa aset untuk daerahnya.

Analisis ini dilakukan untuk menilai apakah realisasi anggaran belanja daerah berjalan dengan baik dan efektif atau tidak, selain itu kita juga bisa melihat apakah daerah sudah mampu dalam memenuhi kebutuhan bagi

[15] Marchelino daling. *Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.* Jurnal Analisis Kinerja Realisasi. Vol.1 No. 3 September 2013. Hal.86

[16] Rani Febri Ramadani. Jurnal analisis kinerja anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah pemerintah kota Samarinda

daerahnya. Hal ini dilakukan supaya pemerintah daerah dapat merubah kinerja keuangan daerah menjadi lebih optimal dan pada periode berikutnya dapat mengalami peningkatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini berjudul **" Analisis Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalahnya adalah;

1. Adanya perbedaan antara anggaran belanja dengan realisasi belanja yang menghasilkan selisih yang mempengaruhi kualitas atau kinerja dari suatu Daerah.
2. Karena adanya perbedaan maka dilakukanlah analisis untuk menilai realisasi anggaran belanja daerah pada Kota Bukittinggi tahun 2016-2020.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas maka batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada menganalisis kinerja realisasi belanja daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016-2020, dimana belanja daerah kota Bukittinggi terdiri dari: belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pertumbuhan realisasi anggaran belanja dari tahun 2016-2020?
2. Apakah penggunaan anggaran belanja selama tahun anggaran telah efisien?
3. Apakah pemerintah telah menggunakan anggaran secara optimal dalam memprioritaskan belanja?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui efisiensi penggunaan anggaran belanja yang digunakan selama tahun anggaran
2. Mengetahui tingkat pertumbuhan realisasi anggaran belanja selama periode anggaran dari tahun ketahun
3. Mengetahui keseimbangan penggunaan anggaran dalam memprioritaskan belanja

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

   Penulisan ini bermanfaat bagi penulis untuk memperluas pengetahuan tentang analisis realisasi anggaran
2. Bagi Badan keuangan Daerah Kota Bukittinggi

Penulisan ini bermanfaat bagi instansi guna untuk memberikan masukan dalam pembuatan realisasi anggaran pada masa yang akan datang.

3. Bagi IAIN Bukittinggi

Sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian, dan menambah bahan bacaan di Perpustakaan IAIN Bukittinggi khususnya mengenai Analisis Realisasi Anggaran.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang perlu kiranya di buat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini hanya pada lingkup seputar pada Laporan Realisasi Anggaran Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi yang memfokuskan pada Belanja Daerah.

H. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul dan menyamakan persepsi, maka perlu dijelaskan judul yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1.2
Penjelasan Judul

Analisis	:	Merupakan proses penguraian dari satu topik yang komplek dengan merinci ke hal yang lebih kecil sehingga mudah untuk di mengerti. Hal ini berarti

		juga bahwa analisis tersebut berupaya untuk menggali kandungan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ataupun menyelesaikan masalah.[17]
Realisasi	:	Tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan dan diharapkan.
Anggaran	:	Suatu rencana yang di susun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam bentuk uang yang di gunakan dalam waktu berjangka di masa yang akan datang.[18]
Belanja Daerah	:	Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang mana tidak akan di peroleh kembali pembayarannya oleh pemerintah daerah.[19]

[17] Pirmatua Sirait, *Analisis Laporan Keuangan.* Edisi 2 cetakan 1,*(*Yogyakarta: Expert,2019), Hal. 32

[18] Abdullah Mubarok. Dkk, *Manajemen Keuangan; Aplikasi pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, (*Yogyakarta: Expert,2019), Hal. 15

[19] Tim Redaksi Fokus media, *Pedoman Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah,* Cetakan pertama, (Bandung: Fokus media, 2008), Hal. 141

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik dapat di artikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang di terapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga- lembaga tinggi negara dan departemen- departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek- proyek kerja sama sektor publik serta swasta.[20]

Akuntansi sektor publik juga dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan di butuhkah oleh pihak- pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang di terapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga- lembaga tinggi negara dan departemen- departemen di bawahnya.[21]

Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur di mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang mana dapat di lihat secara manual ataupun menggunakan aplikasi komputer.[22]

---

[20] Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga*, (Yogyakarta: Erlangga, 2010), Hal.3
[21] Sujarweni wiratna, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Baru press, 2015), Hal.1
[22] Ayuningtyas Hertianti. Dkk, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), Hal.125

Tujuan dari akuntansi sektor publik menurut *American Accounting Assiciation* (AAA) adalah memberikan informasi yang di perlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas alokasi suatu sumber daya yang di percayakan kepada organisasi. Tujuan ini berkaitan dengan pengendalian manajemen (manajemen kontrol). Tugas yang kedua adalah memberikan informasi yang memungkinkan manajemen untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini berkaitan dengan akuntabilitas.[23]

B. Grand Theory

Grand teory yang melandasi penelitian ini adalah *stewarship theory* (Donaldson dan David, 1991) yang mana menggabarkan situasi dimana para manajemen tidak termotivasi untuk tujuan- tujuan individu tetapi tujuannya pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan bersama. Theory stewarship dapat diterapkan pada penelitian akuntansi sektor publik seperti instansi pemerintahan dan non profit lainnya.

Akuntansi sebagai penggerak (*driver)* berjalannya transaksi kearah yang komleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan akuntansi sektor publik. Kontak hubungan antar *steward* dan *principals* atas dasar kepercayaan (amanah), bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi sektor publik adalah *stewardship theory.*

[23] V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Sektor Publik,* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press) ,Hal. 2

Teori stewardship mengkonsumsi hubungan yang kiat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Steward akanmelindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari stewardship adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Namun demikian tidak berarti steward tidak mempunyai kebutuhan hidup (Raharjo, 2007). Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian sktor publik seperti organisasi pemerintahan. Implementasi pada penelitian ini adalah Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai steward (pengurus) sebagai pihak yang dapat bertindak sebaik- baiknya bagi kepentingan publik pada umunya stakeholder dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat sehingga goog governance dapat tercapai. Pengujian ini akan menguji efek pembelajaran *stwardship* terhadap penilaian Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pemerintah kota Bukittinggi.

C. Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan sebuah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang di jadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang memerlukan.[24]

[24] Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Keempat,* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), Hal. 43

Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 membahas tentang pengelolaan keuangan daerah yang mana adalah sebagai berikut: keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggara pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengertian keuangan daerah menurut keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 (yang sekarang berubah menjadi Pemendagri Nomor 13 tahun 2006) tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah: Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat di nilai dengan uang termaksud di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam rangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Hak yang dimaksud adalah hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah, retribusi atau sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Serta kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.[25]

Berdasarkan Per mendagri Nomor 13 Tahun 2006 dalam pasal 2 disebutkan bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
b. Kewajiban daerah menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
c. Penerimaan daerah;
d. Pengeluaran daerah;
e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak- hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
f. Kekayaan pihak lain yang di kuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan atau kepentingan umum.[26]

Tata kelola keuangan daerah yang baik adalah:

a. Partisipasi masyarakat,

[25] Baldric Siregar, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual,* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), Hal. 11
[26] Nur Aisyah, Op. Cit, Hal. 67

b. Transparan atau keterbukaan,

c. Keadilan dalam distribusi alokasi anggaran, dan

d. Akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran.[27]

D. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, Sedangkan penganggaran adalah suatu metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Pada sektor publik anggaran harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan dan diberikan masukan.[28]

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 paragraf 8, anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilakukan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.[29]

Anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu. Anggaran daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan rencana tahunan keuangan pemerintah daerah yang di bahas dan disetujui bersama Dewan

---

[27] Hendra Karianga, *Carut- Marut Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah Perspektif Hukum dan Politik,* (Depok: Kencana, 2017), Hal. 13

[28] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik,* Edisi IV, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2009), hal. 61

[2929] Rani Febri Ramadani, Analisis Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja daerah Pemerintah Kota Samarinda, *Ejurnal, Untag-smd.ac.id,* 2016, Hal. 5

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan di tetapkan dengan peraturan daerah.[30]

Dalam pasal 64 ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok- pokok pemerintahan di daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah di defenisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan- kegiatan dan proyek- proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber- sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran.[31]

Jadi anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah suatu rencana operasional keuangan daerah, di satu pihak menggambarkan penerimaan pendapatan daerah dan di satu pihak lain menggambarkan pengeluaran untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan untuk membiayai kegiatan- kegiatan dan proyek- proyek pembangunan daerah.[32]

Struktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu:

a. Pendapatan Daerah

[30] Iskandar, Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 6 No. 2, 2016, Hal. 121
[31] Abdul Halim, *Op. cit*, Hal. 21
[32] Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan anggaran daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 3

Pendapatan daerah merupakan seluruh penerimaan pada rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu di bayar kembali.[33]

Pendapatan daerah terdiri dari:

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diterima daerah dari sumber- sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.[34]

b) Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan mencangkup Dana Bagi hasil (Pajak dan Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

c) Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah

[33] Nunuy Nur Afiah. Dkk, *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Pada Entitas Akuntansi Konsep Dan Aplikas,* Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 13

[34] Dewi Oktavia, Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Rangka Otonomi Daerah: Pendekatan Error Correction Model, *Jurnal Ekonomi Pembangunan,* Vol. 10 No. 2, 2012, Hal. 92

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Lain- lain pendapatan daerah yang sah mencangkup hibah (barang atau uang dan atau uang jasa), dana darurat, Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dari provinsi kepada kabupaten atau kota, dan penyesuaian dan dana otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau Penda lainnya.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang akan tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.[35]

Belanja daerah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

a) Belanja langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang di anggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dari suatu kegiatan terdiri dari belanja pegawai , (honorium atau upah), belanja dan jasa, dan belanja modal.

b) Belanja tidak langsung

[35] Baldric Siregar, Op. Cit, Hal. 31

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang di anggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung ini terdiri atas belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.[36]

E. Laporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005, keuangan daerah iyalah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan daerah tersebut. Sedangkan menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.[37]

Akuntansi keuangan daerah merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak- pihak eksternal entitas pemerintah daerah.[38]

Jenis- jenis laporan keuangan pemerintah adalah sebagai berikut:

---

[36] Nordian Dedi, Dkk, *Akuntansi Pemerintahan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), Hal. 40
[37] Moh. Khusaini, *Keuangan Daerah*, (Malang: UB Press, 2018), Hal. 2
[38] Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Ketiga,* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), Hal. 42

a. Laporan realisasi anggaran

b. Neraca

c. Laporan arus kas

d. Catatan atas laporan keuangan

Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas keuangan, khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya. Pentingnya pemublikasian laporan keuangan adalah:

a. Internal

Laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan, maupun unit- unit di dalamnya (satuan kerja perangkat daerah). Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban internal (*Internal accountibility)*, yaitu bentuk pertanggungjawaban kepada satuan kerja kepada kepala daerah, kepala daerah kepada pegawai pemerintah daerah dan DPRD.

b. Eksternal

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal (*External Accountability*), yaitu pertanggungjawaban kepada daerah, kepada masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak- pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan. Selain itu laporan keuangan tersebut juga perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai (*disclosure*) mengenai informasi- informasi yang dapat mempengaruhi keputusan.[39]

Untuk mengetahui keuangan suatu organisasi apakah tergolong baik atau tidak, kita dapat melihatnya dari laporan keuangan. Secara haris besarnya tujuan dari penyajian laporan keuangan bagi pemerintah daerah adalah:

a. Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.
b. Untuk alat akuntabilitas publik
c. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Laporan keuangan pemerintah daerah disediakan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok pengguna (*General purposive*), meskipun setiap kelompok memiliki kebutuhan informasi yang berbeda- beda. Kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah:

[39] Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), Hal. 3

a. Masyarakat pengguna layanan publik membutuhkan informasi atas kewajaran biaya, harga yang ditetapkan, dan kualitas pelayanan yang diberikan
b. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah mereka berikan. Masyarakat ingin mengetahui apakah pemerintah telah melakukan ketaatan anggaran dan ketaatan pada peraturan atas pengeluaran yang dilakukan, apakah pajak yang telah mereka bayar telah dibelanjakan untuk kepentingan publik, apakah hak- hak publik untuk mendapatkan pelayanan telah terpenuhi dengan baik.
c. Kreditor dan investor membutuhkan informasi keuangan daerah untuk menghitung tingkat rasio berinvestasi, kondisi kesehatan finansial daerah yang tingkat likuiditas dan solvabilitas daerah.
d. DPRD dan kelompok publik informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah daerah dan penyelewengan keuangan negara.
e. Manajer publik membutuhkan informasi keuangan sebagai komponen sistem pengendalian manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi lain yang sejenis.

F. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menghasilkan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya kas yang dikelola pemerintah

dalam satu periode. laporan realisasi anggaran merupakan bentuk ketaatan pemerintah terhadap anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah.[40]

PP No. 71tahun 2010 LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Selain itu, LRA juga dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah, sehingga dapat menilai apakah suatu kegiatan atau program telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat sesuai dengan anggarannya (APBN atau APBD), dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.[41]

Laporan realisasi anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara ter sanding untuk satu periode tertentu. Dalam penyusunan laporan realisasi anggaran, estimasi pendapatan dan apropasi belanja di sajikan pada kolom anggaran, sedangkan realisasi anggaran disajikan pada kolom realisasi. Laporan realisasi anggaran menyajikan unsur- unsur sebagai berikut:

[4040] Bardric Siregar, *Op. Cit*, Hal. 82
[41] Abdul Halim, *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), Hal. 284

a. Pendapatan LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum pemerintah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah

b. Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh kas umum pemerintah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah

c. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari atau kepada entitas pelaporan lain termasuk dana berimbang dan dana bagi hasil.

d. *Surplus/ defisit* LRA

Surplus/defisit LRA adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

e. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun- tahun anggaran berikutnya yang mana dalam

anggaran pemerintahan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

f. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran (Silpa/Sikpa)

Selisih lebih kurang antara realisasi anggaran pendapatan LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam anggaran selama satu periode.[42]

G. Belanja Daerah

Berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE. 900/079/BAKD pada 12 Februari Tahun 2008 tentang kebijakan akuntansi Nomor 7 menyatakan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.[43]

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja berdasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas daerah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja tak terduga. Sedangkan klasifikasi belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, seperti belanja Sekretariat DPRD, belanja Sekretariat Daerah, belanja dinas, belanja kantor, dan lembaga teknis daerah.

[42] Nunuy Nur afiah, Dkk, *Op. Cit,* Hal. 28
[43] Tim Redaksi Fokus Media, *Op. Cit,* Hal. 141

Klasifikasi- klasifikasi belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

a) belanja pegawai, merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam dan luar negeri baik kepada pejabat daerah, Pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan termasuk pembayaran honorium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

b) Belanja barang dan jasa, dicatat untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang dan jasa yang habis dipakai, untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga termasuk pembayaran honorium kegiatan kepada non pegawai, pemberian hadiah uang atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi dan belanja perjalanan.

c) Belanja bunga, merupakan akun belanja untuk pembayaran alokasi bunga (*Interest)* yang dihitung atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding)* termasuk beban pembayaran biaya- biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima

pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda serta dirinci menurut obyek belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi dan objek sejenis lainnya sesuai Akun Bagan Standar yang berlaku.[44]

d) Belanja subsidi, merupakan belanja bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu yang menyediakan barang dan jasa untuk dijual dan diserahkan dalam memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jual produksi / impor/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
e) Belanja hibah, merupakan transfer dalam bentuk uang atau barang atau jasa dari pemerintah daerah yang bersifat tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
f) Belanja bantuan sosial, merupakan pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menurus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

b. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri dari:

a) Belanja modal tanah

[44] Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020

b) Belanja modal peralatan dan mesin

c) Belanja modal gedung dan bangunan

d) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan

e) Belanja modal aset tatap lainnya

c. Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran atau belanja pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos- pos pengeluaran jenis belanja diatas. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang yang dikategorikan ke dalam keperluan mendesak dan keadaan darurat, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, wabah penyakit, serta pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

H. Analisis Keuangan Daerah

Analisis keuangan suatu daerah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: analisis pendapatan daerah serta analisis belanja daerah.[45] Analisis belanja daerah dapat dilakukan dengan menggunakan:

a. Analisis Varian Belanja

Varian belanja menggambarkan selisih antara anggaran belanja dan realisasi belanja, ini menunjukkan ketidak akuratan dalam penetapan target anggaran pada proses penyusunan anggaran. Pada saat pemungutan pendapatan dilaksanakan, kelebihan atau kekurangan atas target yang

[45] Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007), Hal. 122

ditetapkan akan menjadi varian belanja. Analisis varian belanja dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi belanja dengan yang dianggarkan. Biasanya selisih sudah diinformasikan di dalam Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh pemerintah daerah.

Terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah dinilai baik belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi yang dianggarkan. Berdasarkan laporan realisasi anggaran dan belanja ditinjau dari analisis varian bisa dinyatakan dalam bentuk nominalnya atau persentasenya.[46]

Analisis varian belanja dapat dirumuskan sebagai berikut:

Analisis varian belanja = realisasi belanja – anggaran belanja

Selisih realisasi belanja dengan yang dianggarkan yang cukup signifikan bisa memberikan dua kemungkinan, pertama hal itu menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Kedua justru kebalikannya, jika terjadi selisih kurang maka sangat mungkin telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi belanjanya kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran tersebut bisa jadi karena adanya program dan kegiatan yang tidak dilakukan eksekutif padahal sudah diamanatkan dalam anggaran.

[46] *Ibid*, Hal. 157

Kriteria Varians Belanja

Kriteria Varians Belanja	Ukuran
Baik	Realisasi Belanja < Anggaran Belanja
Kurang Baik	Realisasi Belanja > Anggaran Belanja

b. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya bersifat positif atau negatif, dalam pengertian sudah efisien atau belum serapan dalam penggunaan anggaran yang ada pada instansi untuk membiayai semua kegiatan- kegiatannya.[47]

Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikannya biasanya dikaitkan dengan penyesuaian inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan dan penyesuaian faktor makro ekonomi.

Rumus pertumbuhan belanja adalah sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan belanja tn} = \frac{\text{rea.Belanja Tt} - \text{rea.Belanja Tt-1}}{\text{Rea.Belanja Tt-1}} \times 100\%$$

[47] Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah,* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), Hal. 135

Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing- masing belanja, apakah pertubuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertumbuhan belanja harus diikuti oleh pertumbuhan belanja yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah.[48]

Rasio pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi- potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai total pendapatan daerah (TPD), dan belanja modal yang diikuti oleh semakin rendahnya belanja operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan dari periode yang satu ke periode berikutnya. Jika semakin tinggi nilai total pendapatan daerah, dan belanja operasional diikuti semakin rendahnya belanja modal, maka pertumbuhannya adalah negatif.

Kriteria Penilaian Kinerja Pertumbuhan Belanja

Kriteria	Ukuran
Naik	Positif
Turun	Negatif

[48] Mahmudi, *Op, Cit,* Hal. 160

c. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah daerah dianggap telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran.[49]

Rumus pengukuran efisiensi belanja:

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Anggaran belanja}} \times 100\%$$

Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien pemerintah daerah dalam melakukan anggaran belanja daerah. Berdasarkan Kemendagri Tahun 1996 No. 690.900.327.2016, nilai efisiensi dalam dikategorikan sebagai berikut[50].

a. Sangat efisien : <60%
b. Efisien : 60% - 80%
c. Cukup efisien : 81% - 90%
d. Kurang efisien : 91% - 100%
e. Tidak efisien : >100%

[49] ibid
[50] Kemendagri Tahun 1996 No. 690.900.327.2016

d. Rasio Belanja Operasi

Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan kepada para pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang sifatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah.

Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Belanja operasi} = \frac{\text{Realisasi belanja operasional}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

e. Rasio Belanja Modal

Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca

laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5- 20%.[51]

Rasio belanja modal dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Belanja modal} = \frac{\text{Realisasi belanja modal}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

I. Landasan Syariah

Dalam pandangan ekonomi Islam, dalam melakukan pekerjaan terkait dengan segala sesuatu yang telah dilakukan oleh individu relevan dengan standar tertentu pekerjaan dalam penelitian ini adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran realisasi belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui kebijakan atau ketentuan perundang- undangan selama beberapa periode anggaran.[52]

Terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, Allah mengungkapkan dalam bentuk pahala dan siksa. Ketika manusia melakukan segala perintah Allah maka Allah akan memberikannya pahala. Justru

[51] Mahmudi, *Op, Cit,* Hal. 165
[52] Ima Amliah, Dkk, Pengaruh Nilai Islam Terhadap Kerja, *Jurnal Mimbar,* Vol. 29 No. 23, (2013), Hal. 167

sebaliknya ketika manusia melanggar aturan yang telah di gariskan- Nya, maka Allah mengazabnya dengan siksaan yang pedih, sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an di antarnya surat Al-Kahfi ayat 87-88 yang berbunyi:

قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا

وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَاۤءَ ۨالْحُسْنٰىۚ وَسَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا

Artinya: (87) *Dia, yakni Zulkarnain, berkata, "Siapa saja yang berbuat zalim dan tetap kafir, kami akan menghukumnya dengan hukuman duniawi, kemudian saat kematian menjemputnya, dia akan dikembalikan kepada Tuhannya, kemudian di kala itu Tuhan akan mengazabnya dengan azab yang sangat keras sebagai balasan atas kedurhakaan dan keingkarannya*.

(88) *Adapun orang yang beriman dan membuktikan keimanannya dengan mengerjakan kebajikan, maka dia akan mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan atas apa yang telah diperbuatnya, dan selanjutnya akan kami sampaikan kepadanya, yaitu orang-orang beriman, perintah kami yang mudah-mudah dan tidak memberatkannya."*

Penilaian pekerjaan dalam pandangan Islam harus sesuai pada prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an yaitu:[53]

[53] Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), Hal. 182

a. Keadilan, kompetensi
b. Kejujuran
c. Usaha
d. Inisiatif, pengalaman kerja
e. Kreativitas individu

Firman Allah dalam QS. Al-Ahqaaf ayat 19:

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۚ وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

Artinya: *(19) Dan setiap orang dari kedua kelompok manusia sebagaimana yang disebutkan itu memperoleh tingkatan yakni peringkat yang berbeda-beda baik di surga maupun di neraka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan di dunia dan peringkat itu disempurnakan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan dengan mengurangi ganjaran atau menambah siksaan.*

Dari ayat diatas menerangkan bahwa Allah akan membalas setiap hal yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Artinya jika seseorang melakukan pekerjaannya dengan baik dan menunjukkan hal yang baik pula bagi organisasinya atau masyarakat maka ia akan mendapatkan hasil yang baik pula untuk kerjanya dan dapat memberikan keuntungan bagi organisasinya atau masyarakat.

J. Kajian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari adanya studi- studi terdahulu yang relevan. Adanya studi terdahulu menjadi referensi dalam menyusun penelitian

ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah jika penelitian lain hanya membahas perihal belanja yang mana di dalamnya terdapat belanja daerah yang hanya dibahas secara sekilas, sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas khusus tentang belanja daerah yang dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan segala komponen dari belanja daerah tersebut. Sehingga hasil kesimpulan penelitian ini nantinya tidak hanya menilai seberapa efektifnya keuangan belanja daerah tersebut, namun juga disertai dengan menilai efektif atau tidaknya realisasi dari komponen belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, belanja bantuan sosial), belanja modal (belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya, belanja modal aset lainnya), belanja tidak terduga. Untuk judul dan hasil penelitian dari beberapa studi terdahulu dapat terlihat pada tabel.

Tabel 2.1
Kajian Terdahulu

Penulis/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Dewi Sartika, (2018)[54]	Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada	Hasil analisis berdasarkan analisis pertumbuhan belanja menunjukkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dikatakan cukup baik, karena terlihat adanya

[54] Dewi Sartika, Skripsi, Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatra Utara, *Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, (*2018).

	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatra Utara	pertumbuhan belanja dari tahun 2014-2016 dengan rata-rata 2,35%, dengan nilai maksimal 2,95% pada tahun 2015 dan nilai minimal 1,75% pada tahun 2016. Dari analisis Varians Belanja pada tahun 2014 adalah 90,00%, pada tahun 2015 adalah 87,95% dan pada tahun 2016 adalah 92,53% hal ini menunjukkan adanya penghematan anggaran yang dibelanjakan, karena tidak melebihi dari anggaran yang ditetapkan. Namun dilihat dari rasio efisiensi, realisasi anggaran pada tahun 2014-2015 tingkat efisiensi penggunaan anggaran bisa dikatakan cukup efisien sedangkan pada tahun 2016 tingkat efisiensi penggunaan anggaran kurang efisien. Proritas belanja Bappeda Provinsi Sumatera Utara lebih memprioritaskan belanja operasi (96,25%) bila dibandingkan dengan belanja modal (3,74%).

Sri Rahayu, (2019)[55]	Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah Untuk Meningkatkan Efisiensi Dan Efektifitas PAD Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palembang	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain varian pendapatan menunjukkan bahwa kinerja pendapatan Kota Palembang belum mampu merealisasikan anggaran pendapatan pada tahun tersebut hal ini disebabkan nilai rata-rata varians pendapatan tahun 2016-2018 sebesar Rp 323.607.803.657, Derajat desentralisasi dinilai sedang dengan rata-rata sebesar 28,10%, efektivitas pajak daerah sangat efektif dengan rata-rata 101,54%, anggaran belanjanya baik dengan rata-rata selisih anggaran belanja dan realisasi belanja sebesar Rp 400.206.609.826, keserasian belanjanya kurang serasi rata-rata sebesar 76,12% dari total belanja dan digunakan untuk belanja operasi rata-rata belanja modal terhadap total belanja daerah Kota Palembang pada tahun

[55] Sri Rahayu, Skripsi, Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah Untuk Meningkatkan Efisiensi Dan Efektifitas PAD Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palembang, *Universitas Muhammadiyah Palembang*, (2019).

		2016-2018 memiliki rata-rata sebesar 23,83%, dan efisiensi belanja dengan rata-rata tidak efisien.
Bahrun Assidiqi, (2014)[56]	Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten secara umum dikatakan baik. Hal ini dibuktikan (a) Varians Pendapatan Daerah rata-rata di atas 100%, (b) Pertumbuhan Pendapatan Daerah rata-rata (positif) 12,13%, (c) Rasio Keuangan Pendapatan Daerah dilihat dari Derajat Desentralisasi menunjukkan rata-rata 5,03% (rendah), Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah relatif tinggi rata-rata 90,44%, Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah, secara umum rasio efektifitas rata-rata 103,82% dan rasio efisiensi rata-rata 12,33%, Derajat Kontribusi BUMD mencapai angka rata-rata 0,23%. (2) Kinerja Keuangan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini dibuktikan (a)

[56] Bahrun Assidiqi, Skripsi, Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012, *Universitas Negeri Yogyakarta*, (2014).

		Varians Belanja Daerah rata-rata di bawah 100%, (b) Pertumbuhan Belanja Daerah mengalami pertumbuhan rata-rata 11,00%, (c) Keserasian Belanja Daerah dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk Belanja Operasi rata-rata 90,33% dibandingkan dengan Belanja Modal rata-rata 9,57%, (d) Efisiensi Belanja Daerah menunjukkan rata-rata di bawah 100%.
Marcheli no Daling, (2013)[57]	Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara	Hasil penelitian menyimpulkan kinerja pendapatan belum efektif hal ini terlihat dari lebih kecilnya jumlah yang terealisasi dengan yang telah dianggarkan. Sedangkan untuk kinerja belanja sudah efektif hal ini dapat dilihat dari kecilnya anggaran belanja yang terealisasi dari yang telah dianggarkan sehingga Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan penghematan dan berdampak pada adanya SILPA surplus. Meningkatkan PAD merupakan hal yang

[57] Marchelino Daling, Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Binahasa Tenggara, *Jurnal Emba,* Vol. 1 No. 3, (2013)

		harus dilakukan untuk peningkatan pendapatan disertai penghematan belanja.
Ariel Sharon Sumenge, (2013)[58]	Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan	Pelaksanaan anggaran Belanja BAPPEDA Tahun 2008 – 2012, secara keseluruhan sudah diolah secara efisien. Pelaksanaan anggaran belanja tahun 2008 sampai 2011, dikategorikan sangat efisien hanya tahun 2012 dikategorikan efisien.
Ardon Fridolin Honga, Dkk, (2014)[59]	Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa APBD pemerintah kota Bitung terealisasi dengan baik karna realisasi anggaran tidak melebihi target yang dianggarkan. Pemahaman teknis tentang realisasi kinerja keuangan pemerintah yang baik yaitu dengan menerapkan sistim

[58] Ariel Sharon Sumenge, Analisis Efektifitas Dan efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan, *Jurnal Emba,* Vol. 1 No. 3, (2013)

[59] Ardon Fridolin Honga. Dkk, Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung, *Jurnal Emba*, Vol. 2 No. 4, (2014)

	Pemerintah Kota Bitung	akuntansi pemerintahan. Realisasi anggaran pendapatan, anggaran belanja dan realisasi kinerja keuangan telah dilaksanakan dengan baik dalam laporan realisasi anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah mendeskripsikan data yang ada dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat penjelasan secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terjun kelapangan atau pada objek penelitian.

Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data yang dapat memberikan gambaran yang jelas atas objek yang diteliti, untuk kemudian dapat diproses dan dianalisis kemudian menarik sebuah kesimpulan.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuanlitatif. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data kualitatif berupa angka- angka yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengukur keuangan daerah.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi yang beralamat di Jl. Sudirman No. 27-29, Sapiran, Kec Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi,Sumatra Barat 26181. Waktu penelitian dilakukan selama bulan November 2021.

C. Jenis Dan Sumber Data

Data adalah kumpulan angka atau fakta objektif mengenai sebuah kejadian (bahan mentah informasi).[60] Data juga merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang di ukur dalam skala numerik (angka).[61]

Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah Laporan Realisasi Anggaran Daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2016 s/d 2020.

D. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan- satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak di teliti. Populasi dari penelitian ini adalah Belanja Daerah pada Kota Bukittinggi pada tahun 2016-2020.

Sampel adalah sebagai wakil populasi yang akan di teliti, sampel dari penelitian ini adalah Belanja Daerah pada Kota Bukittinggi tahun 2016- 2020,

---

[60] Rhono Rodin, *Teknologi Informasi dan Fungsi Ke pustakawan; Pemikiran Tentang Perpustakaan Dan Kepustakawan Indonesia,* (Yogyakarta: Calpulis, 2017), Hal. 10

[61] Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis? Edisi Tiga,* (Jakarta: Erlangga, 2009), Hal. 145

yang terdiri dari belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, belanja bantuan sosial), belanja modal (belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya, belanja modal aset lainnya), belanja tidak terduga (belanja tidak terduga).

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian ini, ada beberapa teknik atau cara yang dilakukan penulis yang disesuaikan dengan jenis penelitian kuantitatif yaitu:

a. Studi lapangan, melakukan observasi langsung ke tempat penelitian untuk memperoleh data dan mengetahui lebih jelas mengenai masalah yang akan diteliti.
b. Dokumentasi adalah penelitian yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan dokumen- dokumen perusahaan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumentasi ini berupa tulisan, gambar, atau karya- karya.[62] Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data tentang objek yang akan diteliti berupa Laporan Realisasi Anggaran Daerah Kota Bukittinggi tahun anggaran 2016-2020.
c. Wawancara, metode ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi

[62] Dudung Abdulrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2001), Hal. 58

mengenai gambaran Badan Keuangan Daerah pada Kota Bukittinggi dan mengetahui perkembangan dari belanja daerah pada Kota Bukittinggi.

F. Teknik Analisa Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif yang di dasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yakni dengan konsep anggaran khususnya analisis belanja. Analisis deskriptif adalah suatu kegiatan untuk menyusun, mengklasifikasi, menafsirkan serta menyimpulkan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah yang dihadapi atau yang di teliti. Analisis keuangan yang dilakukan dengan cara membandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Langkah- langkah yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

a. mengumpulkan data yang di perlukan dalam penelitian pada Badan Keuangan daerah Kota Bukittinggi.
b. Menghitung data dengan menggunakan analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, rasio belanja modal, rasio belanja operasi, dan rasio efisiensi belanja agar dapat diketahui tingkat efisiensi dari masing-masing analisis dalam penganggaran belanja
c. Menginterpresesikan data yang telah dihitung dengan menggunakan analisis untuk menggambarkan suatu masalah yang terjadi pada instansi tersebut

d. Menyimpulkan masalah yang terjadi dari hasil hitung analisis untuk mengetahui penyebab terjadinya masalah yang terjadi pada instansi tersebut.

Adapun untuk mengetahui analisis realisasi anggaran belanja daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi dapat dihitung dengan menggunakan analisis sebagai berikut:

a. Analisis varians belanja

Analisis varian belanja = realisasi belanja – anggaran belanja

b. Analisis pertumbuhan belanja

$$\text{Pertumbuhan belanja tn} = \frac{\text{rea.Belanja Tt} - \text{rea.Belanja Tt-1}}{\text{Rea.Belanja Tt-1}} \times 100\%$$

c. Analisis rasio efisiensi

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Anggaran belanja}} \times 100\%$$

d. Analisis rasio belanja operasi

$$\text{Belanja operasi} = \frac{\text{Realisasi belanja operasional}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

e. Analisis rasio belanja modal

$$\text{Belanja modal} = \frac{\text{Realisasi belanja modal}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Profil Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi

1. Sejarah Instansi

Pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya Undang-undang No 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1056 Nomor 20), Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Nomor 6, tambahannya nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Bukittinggi menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 212 Ayat (1) Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan pasal 3 ayat (1) peraturan 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan pasal 3 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, perlu menetapkan peraturan daerah tentang pembentukan susunan daerah.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pemerintah Kota Bukittinggi telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 tahun 2016 tentang

pembentukan dan susunan perangkat daerah pada tanggal 2 Desember 2016, maka perlu menetapkan peraturan Walikota tentang kedudukan, susunan, tugas, dan fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan.

2. Lokasi Instansi

Kantor Badan Keuangan Kota Bukittinggi beralamat di Jl. Sudirman No 27-29, Sapiran, Kec. Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26181. Kantor Badan Keuangan sendiri merupakan bangunan Kantor Walikota lama sebelum dipindahkan ke Jalan Kesuma Bhakti Kelurahan Gulai Bancah Kota Bukittinggi.

3. Visi Misi

Visi merupakan suatu pandangan ke depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi. Adapun visi dari Badan Keuangan Kota Bukittinggi yaitu “Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang professional, transparan, dan akuntabel bedasarkan peraturan perundang-undangan.

Proses pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara professional, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka mencapai visi tersebut disusun misi sebagai suatu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam menjabarkan visi yang telah ditetapkan.

Misi dari Badan Keuangan ini juga mempedomani dari Pemerintah Kota Bukittinggi. Misi Badan Keuangan Kota Bukittinggi ditetapkan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pemerintahan yang baik
b. Mewujudkan akuntabilitas manajemen pengelolaan keuangan daerah.
c. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang terstruktur dan berkualitas
d. Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan asset daerah yang proffesional, akuntabel dan transparan.
e. Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan aset.

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Kota Bukittinggi, karena itu terdapat 5 (lima) misi atau langkah utama untuk mencapai visi Badan sebagai sebuah lembaga pemerintahan yang memegang keuangan Kota Bukittinggi. Fungsi dan peran penting bagi pengelolaan keuangan daerah, Badan Keuangan Kota Bukittinggi harus mampu menjadi sebuah lembaga pemerintah yang terkelola dengan baik.

4. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misi diatas Badan Keuangan Kota Bukittinggi menetapkan 5 tujuan yang akan dicapai dalam 5 tahun kedepan sebagai berikut :

a. terwujudnya tata pemerintahan yang baik
b. meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan keuangan yang baik

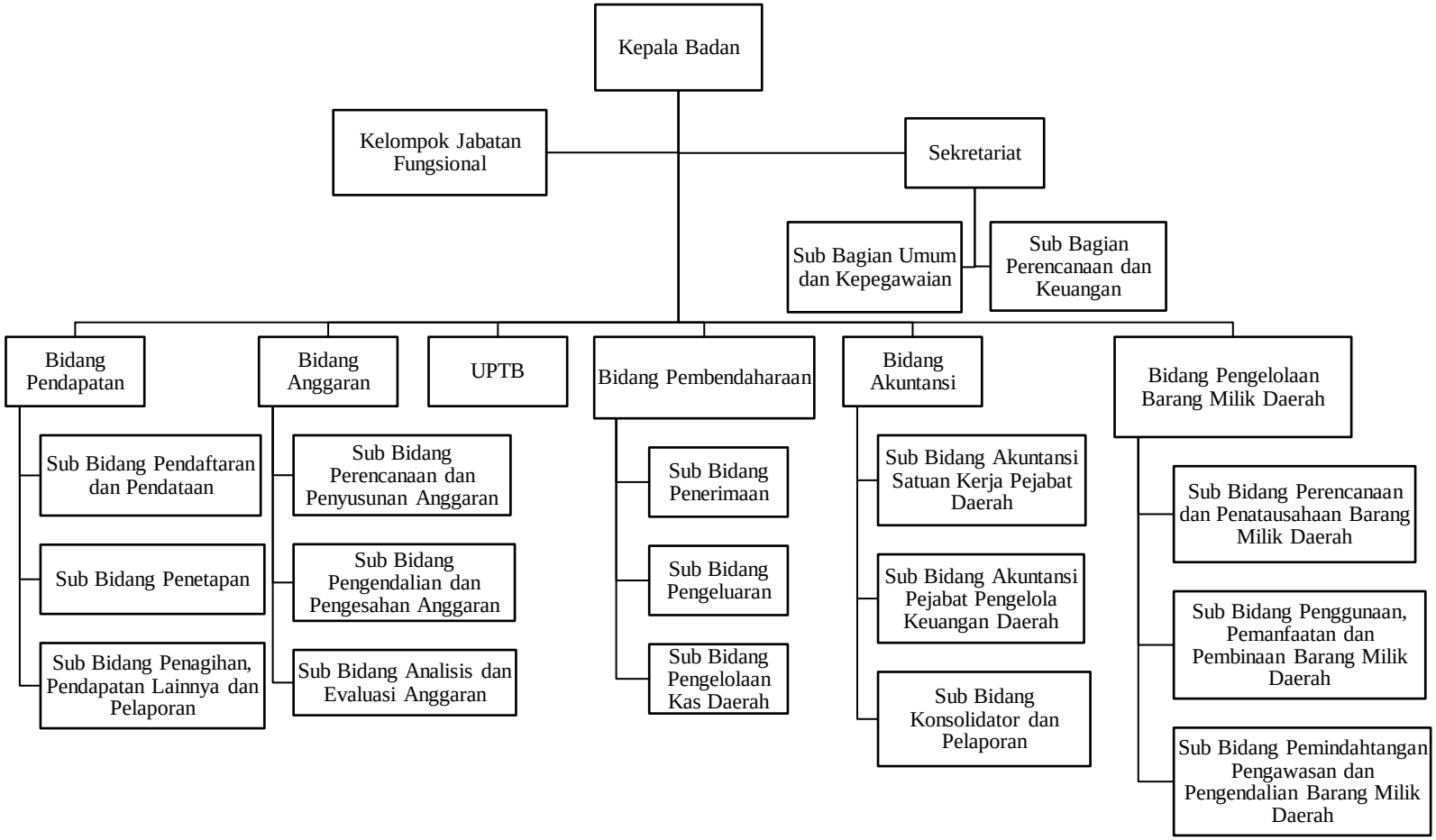
c. meningkatkan pendapatan keuangan daerah yang sinergis dan realistis
d. terciptanya tata pengelolaan keuangan yang profesional, transparan dan akuntabel.
e. Terdapatnya potensi kekayaan daerah yang dapat memberikan konstribusi dalam penerimaaan daerah.

Tujuan pertama adalah tujuan umum manajemen organisasi Badan Keuangan Kota Bukittinngi, sedangkan tujuan kedua hingga kelima adalah bagian yang menggambarkan fungsi pengelolaan Badan Keuangan Kota Bukittinggi, sebagai ujung tombak pengelolaan keuanagan di Kota Bukittinggi.

5. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionall untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Berikut struktur organisasi Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

Susunan organisasi Badan Keuangan Kota Bukittinggi



Sumber : Peraturan Wali Kota Bukittinggi No 55 Tahun 201

6. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program atau kegiatan dalam rangka mencapai sasaran,tujuan, serta visi dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan sebgai berikut :

a. Meningkatakan kemampuan sumber daya Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah (Penerimaan dan Penganggaran) dan Pengelolaan Aset Daerah (Modal sumber Daya)
b. Meningkatkan kualitas sisitem akuntansi yang efektif,efisien dan akuntabel.
c. Meningkatkan pelayanan prima
d. Mengembangkan potensi dan sumber daya daerah
e. Meningkatkan kapasitas pengembangan badan keuangan kota bukittinggi

7. Struktur Organisasi Kerja Industri Mitra

Setiap perusahaan membentuk struktur organisasi yang menunjukan tanggung jawab untuk setiap posisi pekerjaan dan hubungan antar posisi tersebut. Struktur posisi mengandung arti penetapan batasan-batasan tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari masing-masing pegawai.

Susunan organisasi Badan Keuangan Kota Bukittinggi :

a. Kepala badan

b. Sekretatiat, terdiri atas :

   a) Sub bagian umum dan kepegawaian.

   b) Sub bagian perencanaan dan keuangan.

c. Bidang pendapatan, terdiri atas :

   a) Sub bidang pendaftaran dan pendataan

   b) Sub bidang penetapan

   c) Sub bidang penagihan, pendapatan lainnya dan pelaporan.

d. Bidang Anggaran, terdiri atas :

   a) Sub bidang perencanaan dan penyusunan anggaran

   b) Sub bidang pengendalian dan pengesahan anggaran.

   c) Sub bidang analisis evaluasi anggaran.

e. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :

   a) Sub bidang penerimaan

   b) Sub bidang pengeluaran

   c) Sub bidang pengelolaan kas daerah

f. Bidang akuntansi, terdiri atas :

   a) Sub bidang akuntansi satuan kerja perangkat daerah

   b) Sub bidang akuntansi pejabat pengelola keuangan daerah

   c) Sub bidang konsolidator dan pelaporan

g. Bidang Pengelolaan Barang Milik Derah, terdiri atas :

   a) Sub bidang perencanaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah

b) Sub bidang penggunaan, pemanfaatan dan pembinaan Barang Milik Daersh.

c) Sub bidang pemindahtanganan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah.

h. Unit Pelaksana Teknis Badan

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Perhitungan Rasio Kinerja Reaisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Bukittinggi

Berdasarkan hasil penelitian data laporan keuangan daerah Kota Bukittinggi pada Laporan Realisasi Anggaran, untuk hasil perhitungan analisis kinerja keuangan kota Bukittinggi tahun anggaran 2016 – 2020 berdasarkan laporan realisasi anggaran belanja daerah kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan Analisis Varians Belanja

Merupakan analisis terhadap perbedaaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran yang ada pada anggaran yang tersedia di tahun anggaran tersebut. Analisis varian belanja dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi belanja dengan yang dianggarkan. Terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah dinilai baik belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi yang dianggarkan.

Selisih realisasi belanja dengan yang dianggarkan yang cukup signifikan bisa memberikan dua kemungkinan, pertama hal itu menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Kedua justru kebalikannya, jika terjadi selisih kurang maka sangat mungkin telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi belanjanya kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran tersebut bisa jadi karena adanya program dan kegiatan yang tidak dilakukan eksekutif padahal sudah diamanatkan dalam anggaran.

Berikut ini tabel hasil perhitungan analisis varians belanja daerah pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2016 – 2020:

Tebel 4.1
Analisis Varians Belanja Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi
Tahun 2016-2020

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Varians Belanja	(%)
2016	739,912,598,927.22	630,661,294,710.00	109,251,304,217.22	85,23
2017	732,873,501,966.34	590,090,904,897.65	142,782,597,068.69	80,51
2018	838,430,535,411.22	703,783,258,315.95	134,647,277,095.27	83,94
2019	890,512,534,055.88	716,528,264,978.33	173,984,269,077.55	80,46

2020	882,923,068,255.10	795,954,479,299.95	86,968,588,955.15	90,14

Data Anggaran BKD Bukittinggi

Berdasarkan tabel 4.1 Analisis Varians Belanja Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016- 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut ini:

Dari tahun 2016 sampai 2020 varians belanja daerah Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2016 penyerapan penggunaan anggaran yang tersirat pada tabel varians belanja diatas adalah sekitar Rp.109,251,304,217.11 atau 85,23% yang mana menunjukan bahwa tidak semua aktifitas dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi terserap sepenuhnya pada biaya yang berjalan selama satu periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam hal ini menyisakan perbandingan persentase sekitar 14,77% dari penyerapan anggaran yang ada dalam realisasi anggaran belanja pada instansi.

Pada tahun 2017 penyerapan penggunaan anggaran berdasarkan varians belanja adalah sekitar Rp.142,782,597,068.69 atau sekitar 80,51%, dimana menyisakan sekitar 19,49% dari penyerapan yang ada dalam realisasi anggaran belanja dalam instansi. Bisa dilihat terjadi penurunan dalam penggunaan anggaran dari tahun sebelumnya sebesar 4,72% jika memperhatikan pada tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya pengurangan anggaran pada belanja daerah yaitu belanja pegawai,

belanja bantuan sosial, belanja modal dan peralatan dan mesin. Pada tahun 2018 penyerapan penggunaan anggaran berdasarkan varians belanja adalah sekitar Rp.134,647,277,095.27 atau sekitar 83,94% dimana menyisakan 16,06% dari penyerapan yang ada dari realisasi anggaran belanja dalam instansi. Bisa kita lihat terjadi kenaikan dalam pengguaan anggaran dari tahun sebelumnya sebesar 3,43% jika memperhatikan pada tahun sebelumnya.

Pada tahun 2019 penyerapan penggunaan anggaran berdasarkan varians belanja adalah sekitar Rp.173,984,269,077.55 atau sekitar 80,46% dimana menyisakan 19,54% dari penyerapan yang ada dari realisasi anggaran belanja dalam instansi. Bisa kita lihat terjadi penurunan dalam penggunaan anggaran dari tahun sebelumnya sebesar 3,48% jika memperhatikan pada tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya pengurangan anggaran belanja pada belanja barang, belanja hibah, belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal aset tetap lainnya, serta anggaran pada belanja modal aset lainnya ditiadakan.

Pada tahun 2020 penyerapan penggunaan anggaran berdasarkan varians belanja adalah sekitar Rp.86,968,588,955.15 atau sekitar 90,14% dimana menyisakan 9,86% dari penyerapan yang ada dari realisasi anggaran belanja instansi. Bisa kita lihat terjadi kenaikan dalam penggunaan anggaran dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 9,68% jika memperhatikan pada tahun sebelumnya.

Dilihat dari semua perubahan tahun ketahun penyerapan dalam penggunaan anggaran dapat dikatakan efisien yang mana juga bisa kita lihat dari segi keuangan yang mengalami kenaikan dan penurunan, namun demikian pada dasarnya kinerja anggaran yang ada dapat dikatakan baik karena adanya penghematan anggaran. Pembiayaan dari penggunaan anggaran yang lebih akan menjadi SiLPA dalam pembiayaan di tahun berikutnya.

Analisis dalam tabel 4.1 dapat dikatakan jika nilai presentase dari varians belanja daerah yang kurang dari 100% setiap tahunnya dikarenakan adanya pengendalian yang ketat oleh pemerintah daerah seperti pengendalian dalam perealsasian belanja operasional sehingga terjadilah penghematan dalam belanja daerah, dimana dalam penghematan tahun sekarang dapat digunakan kembali untuk pembiayaan anggaran tahun berikutnya. Hasil ini juga mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010: 157)[63] yaitu pemerintah daerah memiliki kinerja dalam perealisasian belanja keuangan daerah yang baik apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang di targetkan.

2. Perhitungan Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Analisis pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya bersifat positif atau negatif, dalam pengertian sudah efisien atau belum

[63] Mahmudi, Hal. 157

serapan dalam penggunaan anggaran yang ada pada instansi untuk membiayai semua kegiatan- kegiatannya. Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan masing- masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dapat dicari dengan menggunakan rumus:

$$\text{Pertumbuhan belanja tn} = \frac{\text{rea.Belanja Tt} - \text{rea.Belanja Tt-1}}{\text{Rea.Belanja Tt-1}} \times 100\%$$

Tabel 4.2
Rekapitulasi Aggaran Belanja Daerah 2016- 2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	Belanja Operasi	Belanja Modal
2016	739,912,598,927.22	630,661,294,710.00	549,734,725,619.00	80,926,569,091.00
2017	732,873,501,966.34	590,090,904,897.65	474,354,352,043.65	115,736,552,854.00
2018	838,430,535,411.22	703,783,258,315.95	525,756,244,621.95	178,010,817,194.00
2019	890,512,534,055.88	716,528,264,978.33	528,444,715,821.46	187,986,455,096.79
2020	882,923,068,	795,954,479,	515,151,376,1	249,317,613,

	255.10	299.95	93.13	815.32

Data Anggaran BKD Bukittinggi

Perhitungan dengan menggunakan rumus pertumbuhan belanja berdasarkan tabel 4.2 maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Analisis Pertumbuhan Belanja Tahun 2016-2020

Uraian	Realisasi Belanja Tahun t-1	Realisasi Belanja Tahun t	Kenaikan/ Penurunan	%
2016-2017	630,661,294,710.00	590,090,904,897.65	-40,570,389,812.35	-6,43
2017-2018	590,090,904,897.65	703,783,258,315.95	113,692,353,418.30	19,26
2018-2019	703,783,258,315.95	716,528,264,978.33	12,745,006,662.38	1,81
2019-2020	716,528,264,978.33	795,954,479,299.95	79,426,214,321.62	11,08

Data Hasil Olahan

Berdasarkan hasil perhitungan analisis pertumbuhan periode 2016 sampai dengan 2020 pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi yang ditunjukan pada tabel 4.3. Berdasarkan tabel maka dapat persentase pertubuhan perealisasian anggaran belanja pada tahun 2016-

2017 adalah sebesar -6,43% yang mana bernilai negatif, hal ini terjadi karena adanya belanja yang tidak terlaksana pada tahun berjalan yang mana berupa belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin serta adanya belanja modal aset tetap lainnya yang tidak terealisasikan sepersenpun dari anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 presentase pertumbuhan perealisasian anggaran belanja daerah meningkat dan bernilai positif yaitu sebesar 19,26% dimana kenaikan ini juga diiringi dengan terlaksananya belanja-belanja yang tidak terealisasikan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 persentase pertumbuhan perealisasian anggaran belanja daerah mengalami penurunan, walaupum demikian penurunan yang terjadi tetap bernilai positif. Penuruanan yang terjadi disebabkan oleh menurunnya perealisasian anggaran belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal tanah, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal aset tetap lainnya serta belanja modal aset lainnya yang tidak dianggarkan. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 persentasi pertumbuhan perealisasian anggaran belanja daerah mengalami peningkatan yaitu sebesar 11,08%.

Dilihat dari analisis pertumbuhan perealisasian anggaran belanja daerah diatas, dapat diketahui bahwa nilai persentase tertinggi terjadi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, sedangkan persentase pertumbuhan perealisasian anggaran belanja daerah terendah terjadi pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 yang bernilai negatif.

Dapat disimpulkan bahwa perealisasian anggaran belanja daerah pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota bukittinggi mengalami kenaikan dan penurunan, kenaikan dan penurunan ini terjadi karena nilai perealisasian disetiap tahunnya berbeda-beda. Hasil dari penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Ir. Agus Purnomo, MT. Pada 02 Oktober 2019[64] yang mana walaupun pertumbuhan belanja daerah mengalami kenaikan dan penurunan tetapi pemerintah tetap bisa memenuhi kebutuhan guna kelancaran kegiatan pemerintahan.

3. Perhitungan Analisis Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Kriteria efisiensi belanja berdasarkan Kemendagri Tahun 1996 No. 690.900.327.2016 adalah sebagai berikut:

- Sangat efisien : <60%
- Efisien : 60% - 80%
- Cukup efisien : 80% - 90%
- Kurang efisien : 90% – 100%
- Tidak efisien : >100%

Rumus yang digunakan adalah realisasi belanja daerah dibagi dengan anggaran belanja daerah kemudian dikalikan dengan seratus persen.

[64] Agus Purnomo, Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Cimahi Periode 2009-2018, *Jurnal Akuntans*, 02 Oktober 2019.

Tabel 4.4
Rasio Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2016 - 2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2016	739,912,598,927.22	630,661,294,710.00	85,23	Cukup Efisien
2017	732,873,501,966.34	590,090,904,897.65	80,51	Cukup Efisien
2018	838,430,535,411.22	703,783,258,315.95	83,94	Cukup Efisien
2019	890,512,534,055.88	716,528,264,978.33	80,46	Cukup Efisien
2020	882,923,068,255.10	795,954,479,299.95	90,14	Kurang Efisien
Rata-rata			84,056%	

Data hasil olahan

Hasil dari perhitungan rasio efisiensi belanja Badan Keuangan daerah Pemerintah Kota Bukittinggi yang terdapat pada tabel 4.4 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2016 tingkat efisiensi penggunaan anggaran berada pada presentase 85,23% dengan penggunaan anggaran sekitar Rp.630,661,294,710.00 dari total anggaran yang ada dimana hal ini dinilai cukup efisien dan juga telah melakukan penghematan anggaran belanja yang mana dibuktikan dengan perealisasian belanja yang tidak melebihi

dari anggaran yang ada. Hal ini bisa dilihat dari perealisasian belanja pegawai memiliki persentanse 94,37% dan Belanja barang senilai 79,89%.

Tahun 2017 tingkat efisiensi penggunaan anggaran berada pada tingkat 80,51% dengan penggunaan anggaran sekitar Rp.590,090,904,897.65 dari total anggaran yang ada, rasio efisiensi pada tahun ini mengalami penurunan yang disebabkan karena adanya pengefisienan terhadap perealisasian belanja pegawai dimana perealisasiannya sebesar 91,38%. Pada tahun ini nilai dari efisiensi belanja adalah cukup efisien. Tahun 2018 tingkat efisiensi penggunaan anggaran berada pada tingkat 83,94% dengan penggunaan anggararan sekitar Rp.703,783,258,315.95 dari total anggaran yang ada, hal ini dinilai cukup efisien.

Tahun 2019 tingkat efisiensi penggunaan anggaran berada pada tingkat 80,46% dengan pengguaan anggaran sekitar Rp.716,528,264,978.33 dari total anggaran yang ada, yang mana hal ini mengalami penurunan yang disebabkan oleh adanya penghematan anggaran pada belanja modal gedung dan bangunan. Walaupun menurun nilai dari efisiensi belanja daerah dinilai cukup efisien. Tahun 2020 tingkat efisiensi penggunaan anggaran berada pada tingkat 90,14% dengan penggunaan anggaran sekitar Rp.795,954,479,299.95 dari total anggaran yang mana hal ini dinilai kurang efisien karena bernilai lebih dari 90%.

Dapat kita simpulkan bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 kemampuan Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi dalam melakukan penghematan anggaran belanja daerah yaitu cukup efisien, hal ini dapat dibuktikan dengan rata- rata rasio efisiensi mencapai sebesar 84,056%. Efisiensi yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi pada umumnya adalah melakukan refocusing anggaran pada beberapa kegiatan guna untuk memenuhi anggaran yang tidak terduga seperti covid. Efisiensi ditentukan oleh ketepatan penggunaan anggaran pada program- program prioritas yang semuanya dimasukan kedalam anggaran belanja. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan dari Ardon: 2014[65] yang mana pemerintah telah melakukan efisiensi terhadap realisasi belanja daerah.

4. Perhitungan Analisis Keserasian Belanja

a. Rasio Belanja Operasi

$$\text{Rasio belanja operasi} = \frac{\text{Realisasi belanja operasi}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Belanja Modal

$$\text{Rasio belanja modal} = \frac{\text{Realisasi belanja modal}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

[65] Ardon F. Honga, Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung, *JurnalEmba*, Vol. 2 No.4 Desember 2014, Hal. 286

Perhitungan dengan rumus keserasian belanja daerah berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi 2016 – 2020, maka dapat kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 4.5
Perhitungan Rasio Belanja Operasi dan Belanja Modal
Tahun 2016-2020

Tahun	Total Belanja	Belanja Operasi	Belanja modal	Presentasi Rasio	
				Belanja Operasi	Belanja Modal
2016	630,661,294,710.00	549,734,725,619.00	80,926,569,091.00	87,16 %	12,83 %
2017	590,090,904,897.65	474,354,352,043.65	115,736,552,854.00	80,38 %	19,61 %
2018	703,783,258,315.95	525,756,244,621.95	178,010,817,194.00	74,70 %	25,29 %
2019	716,528,264,978.33	528,444,715,821.46	187,986,455,096.79	73,75 %	26,23 %
2020	795,954,479,299.95	515,151,376,193.13	249,317,613,815.32	64,72 %	31,32 %

Data Hasil Olahan

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 penggunaan anggaran terfokus pada belanja operasi yang diiringi dengan meningkatnya belanja modal. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah,dan belanja

bantuan sosial. Sedangkan belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan irigasi dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya. Semua ini diatur dan dilaksanakan berdasarkan peraturan dan pedoman ketetapan dari pemerintah yang berlaku.

Tahun 2016 penggunaan pada biaya alokasi pembiayaan belanja operasi bernilai 87,17% atau sekitar Rp.549,734,725,619.00 dengan presentase untuk belanja modal sekitar 12,83% dari total anggaran dalam APBD. Tahun 2017 penggunaan pada alokasi pembiayaan belanja operasi mengalami penurunan menjadi 80,38% atau sekitar Rp.474,354,352,043.65 , sedangkan untuk alokasi belanja modal berada pada nilai 19,61% dari total anggaran dalam ABPD.

Tahun 2018 penggunaan pada biaya alokasi pembiayaan belanja operasi mengalami penurunan senilai 74,70% atau sekitar Rp.525,756,244,621.95 dengan nilai presentase untuk belanja modal sebesar 25,29% dari total anggaran dalam APBD. Tahun 2019 penggunaan pada biaya alokasi pembiayaan belanja operasi mengalami penurunan senilai 73,75% atau sekitar Rp.528,444,715,821.46 dengan nilai presentase untuk belanja modal sebesar 26,23% dari total anggaran dalam APBD. Tahun 2020 penggunaan pada biaya alokasi pembiayaan belanja operasi mengalami penurunan senilai 64,72% atau sekitar Rp.515,151,376,193.13 dengan nilai presentase untuk belanja modal sebesar 31,32% dari total anggaran dalam APBD. Dari tahun 2016 sampai

tahun 2020 nilai presentase dari belanja operasi mengalami penurunan yang dikuti oleh naiknya nilai presentase belanja modal yang mana masih dalam batas wajar.

a) Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Berdasarkan analisis keserasian yang telah dilakukan terhadap data belanja operasi periode 2016 sampai dengan 2020 dapat diperoleh hasil sebagai yang terdapat pada tabel 4.5. Pada tahun 2016 penggunaan pada biaya realisasi anggaran belanja operasi yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi adalah senilai 87,17% yang mana jumlah yang terealisasikan adalah sebesar Rp. 549,734,725,619.00, namun pada tahun 2017 realisasi anggaran belanja operasi mengalami penurunan, nilai belanja operasi yang terealisasian pada tahun 2017 adalah senilai 80,34%. Penurunan ini terjadi karena adanya pengurangan penggunaan anggaran pada belanja barang dan belanja bantuan sosial.

Pada tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 belanja operasi masih mengalami penurunan yaitu senilai 74,70%, 73,75% dan 64,72%. Penurunan ini terjadi karena adanya pengurangan dari anggaran belanja operasi. Walaupun mengalami penurunan dari tahun ketahun Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi tetap berada pada tingkat proporsi belanja operasi yaitu sekitar 60% - 90% (Mahmudi, 2016) dimana rata-rata perealisasian anggaran belanja daerahnya adalah 76,142% dari total belanja daerah.

b) Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Hasil perhitungan analisis belanja modal terhadap total belanja daerah yang ditunjukan dalam tabel 4.5 yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi yaitu dari periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan dimana bernilai 12,83%, 19,61%, 25,29%, 26,23%, dan 31,32%. Peningkatan yang terjadi dari tahun ketahun ini dinilai baik karena memenuhi tingkat proporsi sebesar 5% – 20% (Mahmudi, 2016). Peningkatan dari realisasi belanja modal ini terjadi pada belanja belanja modal peraralan dan mesin, belanja modal aset tetap lainnya.

Dari analisis keserasian belanja modal dan belanja operasi maka dapat disimpulkan bahwa dalam analisis menunjukkan presentase belanja operasi lebih tinggi dari pada presentase belanja modal tetapi tetap berada pada tingkat proporsi belanja operasi yaitu sekitar 60% – 90% (Mahmudi, 2016), yang mana ini bisa menyeimbangi dengan anggaran alokasi belanja modal yang pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah antara 5- 20% (Mahmudi, 2016), pada tahun 2016 sampai 2020 Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi telah meningkatkan pembangunan daerahnya dengan dibuktikan dalam belanja modal yang meningkat disetiap periode. Hal ini dinilai cukup baik karena Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi sudah melakukan keseimbangan antara kedua belanja tersebut. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sartika pada tahun

2018[66] yang mana dalam perealisasian belanja daerah pemerintah lebih dominan melakukan pengeluaran untuk belanja operasional yang mana merupakan pengeluaran yang rutin dilakukan setiap tahunnya.

C. Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi

1. Pertumbuhan realisasi anggaran belanja dari periode 2016 sampai dengan 2020

Berdasarkan analisis pertumbuhan belanja untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan belanja, maka dapat diketahui bahwa Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bukittnggi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan dan kenaikan dimana, pada periode 2016 sampai tahun 2017 mengalami penurunan pertumbuhan yang mana bernilai negatif yaitu sebesar Rp.40,570,389,812.35 atau sebesar -6,43%. Penurunan pertumbuhan belanja yang terjadi pada tahun 2016 sampai pada tahun 2017 dikarenakan oleh ada belanja yang tidak menjadi prioritas atau tidak terlaksana didalam tahun berjalan yaitu tahun 2017 (belanja yang tidak jadi prioritas yaitu belanja modal tanah).

Dari periode 2017 sampai dengan 2020 pertumbuhan belanja bernilai positif dimana pertumbuhan terbesar tarjadi pada tahun 2017 sampai tahun 2018 yaitu senilai Rp.113,692,353,418.30 atau sebesar

[66] Dewi Sartika, Hal. 60.

19,26%. Pada tahun 2017 sampai tahun 2020 kenaikan pertumbuhan belanja bernilai positif yang mana pertumbuhan tertinggi terjadi pada rentang tahun 2017 sampai tahun 2018.

2. Efisiensi penggunaan anggaran belanja selama tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2020

Berdasarkan analisis varians belanja yang berfungsi untuk mengetahui efisiensi penggunaan anggaran belanja selama tahun anggaran dengan tidak melebihi anggaran pada periode tersebut. Dapat dilihat pada tahun 2016 selisish penggunaan anggaran adalah sebesar 85,23% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp.630,661,294,710.00. Tahun 2017 selisih penggunaan anggaran sebesar 80,51% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp.590,090,904,897.65. Tahun 2018 selisih penggunaan anggaran sebesar 83,94% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp.703,783,258,315.95. Tahun 2019 selisish penggunaan anggaran sebesar 80,46% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp.716,528,264,978.33. Tahun 2020 selisish penggunaan anggaran sebesar 90,14% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp.795,954,479,299.95.

Dapat kita simpulkan bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 kemampuan Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi dalam melakukan penghematan anggaran belanja daerah yaitu cukup efisien sesuai dengan ketentuan Kemedagri Tahun 1996 No. 690.900.327.2016 yaitu rentang 80% -90% dinilai cukup efisien , hal ini

dapat dibuktikan dengan rata- rata rasio efisiensi mencapai sebesar 84,056%. Efisiensi ditentukan oleh ketepatan penggunaan anggaran pada program- program prioritas yang semuanya dimasukan kedalam anggaran belanja. Jenis belanja daerah yang perlu diefisiensikan adalah berupa belanja langsung yaitu belanja pegawai, balanja belanja barang dan belanja modal.

3. Optimalisasi dalam memprioritaskan belanja pemerintah daerah pada peggunaan anggaran

Berdasarkan analisis keserasian belanja yang bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antara belanja, dalam menprioritaskan alokasi dananya dapat dilakukan dengan menghitung rasio belanja operasi dan belanja modal. Tahun 2016 penggunaan pada biaya alokasi pembiayaan belanja operasi sebesar 87,17% atau sekitar Rp. 549.734.725.619.00. Tahun 2017 sebesar 80,38% atau sekitar Rp. 474.354.352.043.65. Tahun 2018 sebesar 74,70% atau sekitar Rp. 525.756.244.621.95. Tahun 2019 sebesar 73,75% atau sekitar Rp. 528.444.715.821.46. Tahun 2020 sebesar 64,72% atau sekitar Rp. 515.151.376.193.13. Dari tahun 2016 sampai tahun 2020 nilai presentase dari belanja operasi mengalami penurunan yang dikuti oleh naiknya nilai presentase belanja modal yang mana masih dalam batas wajar.

Untuk penggunaan pada pembiayaan operasi sudah menjadi urusan tetap yang harus disegerakan untuk pembiayaan selama periode anggaran pertahunnya. Berdasarkan analisis menunjukkan presentase belanja

operasi lebih tinggi dari pada presentase belanja modal tetapi tetap berada pada tingkat proporsi belanja operasi yaitu sekitar 60% – 90% (mahmudi, 2016), yang mana ini bisa menyeimbangi dengan anggaran alokasi belanja modal yang pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah antara 5%- 20% (Mahmudi, 2016). Hal ini dinilai cukup baik karena Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi sudah melakukan keseimbangan antara kedua belanja tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut,

Secara keseluruhan pertumbuhan realisasi anggaran belanja daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016- 2020 telah efisien. Perealisasiannya bernilai positif atau tidak melebihi dari anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi walaupun mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2016- 2020. Penyebab dari terjadinya kenaikan dan penurunan dari pertumbuhan belanja ini adalah karena anggaran yang telah ditetapkan tidak terealisasi seluruhnya.

Untuk efesiensi dalam Realisasi Anggaran Belanja Daerah selama tahun anggaran 2016 sampai dengan 2020 dengan menggunakan analisis Varians Belanja adanya efisiensi dalam perealisasian anggaran selama tahun anggaran, karena tidak melebihi dari anggaran yang telah ditetapkan. Jika dilihat dari pengukuran Rasio Efesiensi Belanja memperlihatkan bahwa penggunaan anggaran juga telah efisien yang mana untuk menggunakan dana yang minimum untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Berdasarkan perhitungan Analisis Keserasian Belanja Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi lebih memprioritaskan kepada belanja operasi dari pada belanja modal, dimana pemerintah Kota Bukittinggi

lebih mengoptimalkan pelaksanaan jalannya pemerintahan dari pada pembangunan daerahnya, walaupun demikian pertumbuhan perealisasian belanja modal dari tahun 2016 sampai tahun 2020 selalu mengalami peningkatan. Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan perealisasian anggaran belanja daerah berdasarkan ketentuan dari jumlah perealisasian belanja operasi dan belanja modal. Rata- rata belanja operasi dari tahun 2016-2020 adalah 76,14% sedangkan rata- rata belanja modal adalah 23,05%. Hal ini sudah baik dan sesuai dengan ketentuan perealisasian belanja operasional dan belanja modal.

B. Saran

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa perealisasian belanja daerah, dengan menggunakan lebih banyak rasio serta dapat menggabarkan keadaan keuangan yang sebenarnya. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan waktu penelitian sehingga hasil penelitiannya lebih andal dan akurat dari pada penelitian ini.

2. Bagi Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi

   Pertumbuhan belanja daerah Pemerintah Kota Bukittinggi sudah baik, walaupun pada periode 2016- 2017 mengalami pertumbuhan yang bernilai negatif tetapi bisa diatasi perealisasiannya pada tahun berikutnya. Dalam analisis varians belanja Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan pengefisienan dalam perealisasian anggaran belanja daerah

yang mana dalam penggunaan anggaran seminimum mungkin dan hasil yang maksimum terutama untuk perencanaan dan pembangunan daerah.

Bagi Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi dapat untuk lebih meningkatkan kinerja dalam pengelolaan anggaran dan realisasi belanja daerah. Dengan kinerja yang baik maka efektifitas, produktifitas dan efesiensi belanja juga akan semakin baik. Terutama dalam meningkatkan anggaran agar optimalisasi yang diinginkan dapat segera terlaksanakan sesuai dengan visi dan misi dari Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi.